

**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)  
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA DI DESA  
PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA  
KABUPATEN SUKABUMI**

A. B. Setiawan<sup>1</sup>, W. Supriyanti<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Djuanda

Email: [ade.budi.setiawan@unida.ac.id](mailto:ade.budi.setiawan@unida.ac.id), [windisupriyanti45@gmail.com](mailto:windisupriyanti45@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk memastikan aktivitas serta kendala selama pengelolaan rekap keuangan desa di sebuah Siskeundes di Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi pada pihak Desa Pondokkaso Landeuh. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Siskeundes dalam penyusunan laporan keuangan desa dikatakan baik, tetapi masih ada kekurangan dalam sistem yaitu terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan kurangnya pemahaman mengenai struktur rekap keuangan sejalan dengan PP No. 71 tahun 2010.

**Kata Kunci:** Siskeundes, Penyusunan Keuangan Desa

**PENDAHULUAN**

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang berada di kalangan masyarakat. Pengelolaan kas desa diatur oleh peraturan yang berlaku pada Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pengakuan terhadap desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa memiliki otonomi untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadatnya, namun tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misalnya, peraturan penting mencakup disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi kebijakan dana desa. Dana desa sendiri merupakan kas berasal dari APBN dan diberikan khusus untuk desa. Kas ini disalurkan lewat APBD Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya pemerintahan<sup>1</sup>desa, membangun

infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan kegiatan sosial lainnya. Tujuan utama kas desa adalah membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dan merata, meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dengan alokasi dana yang cukup besar, desa-desa dapat melaksanakan berbagai program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi untuk memastikan pengelolaan keuangan desa mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. (Pratiwi & Pravasanti, 2020) Pemerintahan desa telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dengan tujuan mencapai tata kelola keuangan desa yang lebih baik, pemerintah telah menginisiasi pengembangan SISKEUDES serta melibatkan lembaga pemerintah yang mengurus urusan dalam negeri dan BPKP. SISKEUDES merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja. Dengan demikian, Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut, jika disimpulkan semakin baik hasilnya suatu sistem keuangan desa (Siskeundes) yang dikerjakan desa, sehingga akan semakin dapat dipercaya dalam pengeluaran uang yang dilaporkan pada laporan keuangan Desa. Di sisi lain, penyusunan laporan keuangan yang baik, akan memungkinkan tingkat penyelewengan serta penggelapan uang dapat dicegah dan ditelusuri dengan mudah. (Alawiyah et al., 2023)

Pemerintah pusat, melalui BPKP, telah meluncurkan Siskeudes sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, seperti yang diteliti oleh Rahmawati dan Fajar (2017), telah terbukti efektif dalam membantu perangkat desa menyusun laporan keuangan secara cepat dan akurat. Sejalan dengan temuan Rusmayanti (2014), Siskeudes juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi

pendokumentasian dan menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jangka panjang.

Implementasi siskeundes juga menjadi isu penting. Saat ini, berbagai aplikasi atau software keuangan desa telah dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung desa dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, tidak semua desa mampu mengimplementasikan sistem itu dengan baik. Masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap sistem keuangan desa serta infrastruktur teknologi yang cukup memadai.

### **Rumusan Masalah**

1. Dokumen apa saja yang digunakan dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh?
2. Bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan analisis ini untuk mengetahui aktivitas dan kendala dalam pengelolaan rekap keuangan desa di sebuah Siskeundes di Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Analisis ini menggunakan jenis data kualitatif diperoleh dari wawancara dan dokumentasi pada pihak Desa Pondokkaso Landeuh, dan memuat penjabaran dan pandangan mengenai aplikasi SISKEUNDES di dalam penyusunan laporan keuangan desa.

### Lokasi

Kantor Desa Pondokkaso Landeuh, yang berlokasi di Jl.Raya Siliwangi No.27 Desa Pondokkaso Landeuh Kec.Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Pondokkaso Landeuh mengenai proses penyusunan laporan keuangan Desa berikut ini:

### Dokumen apa yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh

Didalam penyusunan laporan keuangan ada 2 jenis dokumen yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Buku Kas Umum (BKU)

BKU dipakai sebagai catatan seluruh pertukaran yang terjadi, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran dan bisa secara tunai ataupun non tunai.

No.	Tanggal	Kasir	Keterangan	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo Awal	Saldo Akhir	Buku
1	10/10/2024		Penerimaan	10.000.000			10.000.000	
2	10/10/2024		Pengeluaran		5.000.000		5.000.000	

Gambar 1. BKU

Sumber: bku

#### 2. Rekening Koran

Rekening koran adalah sebuah transaksi keuangan yang dimana diterbitkan oleh sebuah bank .

**Gambar 2. Rekening Koran**

Sumber: Rekening Koran Desa

## **Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh**

### **1. Tampilan umum aplikasi**

Pada tahap awal pengembangannya, Siskeundes digagas dan dikembangkan oleh BPKP serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diharapkan dengan aplikasi ini pemerintah pusat mengharapkan supaya pemerintahan Desa bisa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, untuk mendapatkan proses lebih efektif dan efisien. Tampilan muka aplikasi siskeudes adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Tampilan Muka Aplikasi**

### **2. Login aplikasi**

Untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi maka mengharuskan untuk mengisi dengan: User ID dan password bertujuan untuk mengamankan data dalam aplikasi Siskeudes dan memastikan hanya diakses dengan pengguna yang memiliki otoritas.



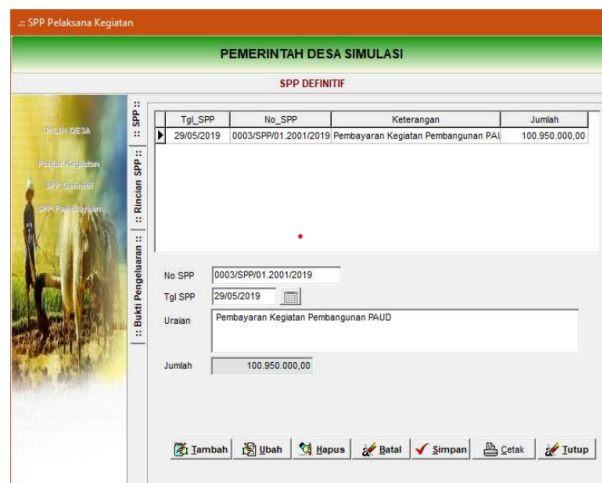
**Gambar 4. Tampilan login aplikasi**

### 3. Penyusunan laporan keuangan

Sebelum penyusunan laporan keuangan yang harus dilakukan ialah mengisi SPP definitif dan pencairan SPP terlebih dahulu.


#### a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif

SPP Definitif diajukan kepada peminta pembayaran atas pekerjaan/barang/jasa yang telah diselesaikan.



**Gambar 5. SPP Definisif**

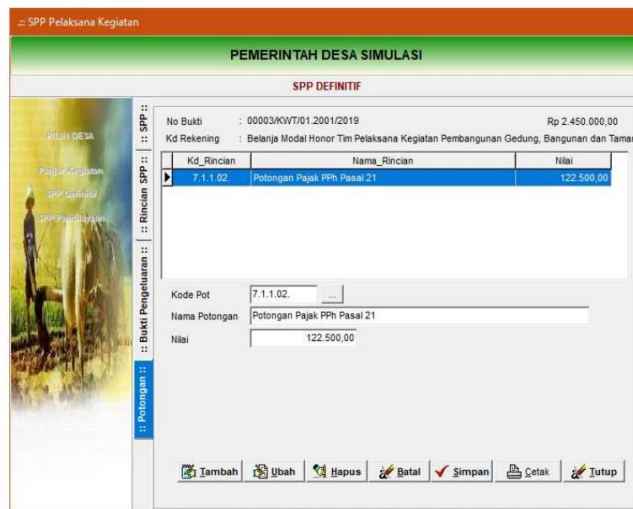
- 1) buka tampilan umum - tekan data entri - tekan penatausahaan – tekan SPP kegiatan
- 2) selanjutnya tekan tombol ‘tambah’ untuk memulai proses data entri SPP
- 3) lalu mengisi kolom yang kosong
- 4) Tekan simpan jika selesai

- 5) lalu tekan tombol dua kali untuk nomor SPP atau pindah hal rincian SPP
- 6) Tekan tombol tambah untuk beralih ke memulai isian rincian belanja
- 7) Pilihlah tombol ini  apabila menentukan kode rekening berdasarkan RAB
- 8) Setelahnya ambil kode rekening belanja serta tekan Simpan
- 9) Tekan tombol dua kali agar dapat melihat rincian belanja atau Pindahkan ke hal Bukti Pengeluaran



**Gambar 6. Bukti Pengeluaran**

- 10) Tekan tombol tambah untuk mulai pengisian bukti pengeluaran
- 11) Lalu isi kolom yang tersedia atau kosong.
- 12) Tekan tombol simpan jika sudah selesai.
- 13) Cetak bukti transaksi pengeluaran, jika diperlukan maka tekanlah tombol cetak.
- 14) Lanjutkanlah pengisian bukti transaksi lainnya.
- 15) Untuk memasukkan potongan data (seperti pajak) pada bukti pengeluaran, silakan tekan bukti pengeluaran tersebut sebanyak dua kali. Anda akan diarahkan ke halaman input data potongan. Tampilannya maka akan seperti dibawah ini:



**Gambar 7. Potongan Pajak PPh**

- 16) Tekan tombol tambah agar memulai pengisian data pemotongan
- 17) Pilihlah ini  untuk mengambil kode Potongan yang telah disediakan.
- 18) Isi kolom besaran nilai potongan lalu tekan tombol simpan
- 19) Ulangi kolom pengisian pemotongan sesuai kebutuhan.
- 20) Jika ingin melihat bukti pengeluaran maka tetap berada pada hal bukti Pengeluaran atau hal Potongan, dengan melakukan seperti tekan tombol cetak maka akan keluar seperti berikut:



**Gambar 8. Bukti Pengeluaran Uang**

b. Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Permohonan Pencairan dana dilakukan berdasarkan SPP yang diberi izin oleh kepala desa serta agar proses lebih lanjut maka kaur keuanganlah yang

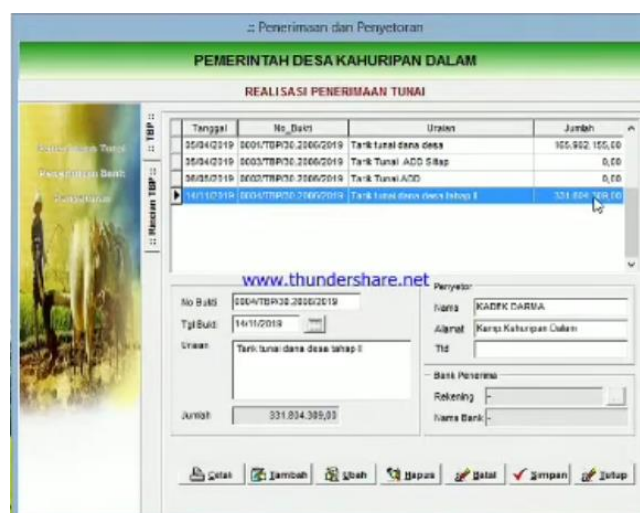
bertanggung jawab. Untuk melakukan pencairan SPP maka dilakukan terlebih dahulu dengan mengisi data penerimaan desa.

- 1) Masuklah ke awal tampilan aplikasi – selanjutnya tekan tombol penatausahaan – dilanjutkan dengan tekan pencairan SPP – lalu tekan penerimaan Desa, sehingga tampak seperti ini:



Gambar 9. Penerimaan Desa

Silahkan akses tombol menu yang terletak di sebelah kiri untuk melanjutkan. Ada tombol “penerimaan tunai” digunakan untuk penarikan secara tunai, sedangkan “penerimaan bank” dipakai untuk transfer ke bank – bank ke atm aparatur.

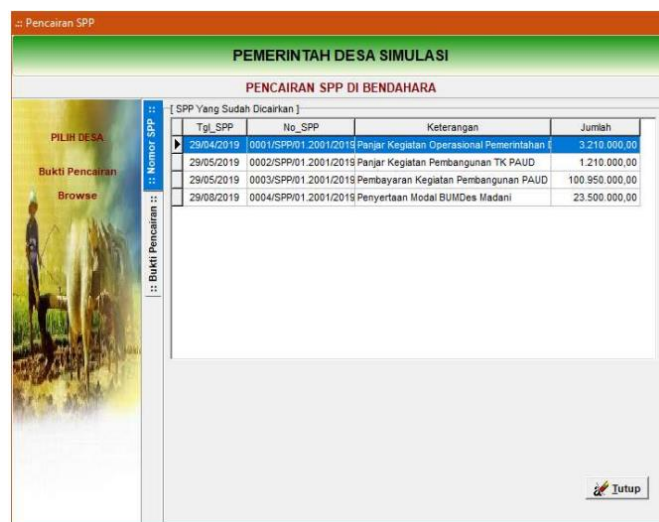


Gambar 10. Pemilihan Secara Tunai

- 2) Dilakukan dengan pembayaran secara tunai

- 3) Masukkan tanggal, waktu penarikan, tulis nama kaur keuangan, alamat dan simpan
- 4) Masuk Kembali dengan dana yang akan dicairkan dan tuliskan nominal yang dibutuhkan dengan tekan tombol tambah, jika sudah tekan tombol pilih
- 5) Nominal yang tadi sudah dipilih harus sesuai dengan SPP definitif, setelahnya klik simpan – keluar.

Sekarang untuk melakukan pencairan SPP masuk Kembali dengan Langkah masuk ke menu awal muka aplikasi – tekan penatausahaan – tekan pencairan SPP, sehingga tampak formular seperti:



PEMERINTAH DESA SIMULASI			
PENCAIRAN SPP DI BENDAHARA			
[ SPP Yang Sudah Dicairkan ]			
Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
29/04/2019	0001/SPP/01.2001/2019	Panjar Kegiatan Operasional Pemerintahan	3.210.000,00
29/05/2019	0002/SPP/01.2001/2019	Panjar Kegiatan Pembangunan TK PAUD	1.210.000,00
29/05/2019	0003/SPP/01.2001/2019	Pembayaran Kegiatan Pembangunan PAUD	100.950.000,00
29/08/2019	0004/SPP/01.2001/2019	Penyertaan Modal BUMDes Madani	23.500.000,00

**Gambar 11. Pencairan SPP**

Silahkan akses tombol menu yang terletak di sebelah kiri untuk melanjutkan. Tekan tombol “Pencairan” dipakai untuk menampilkan SPP yang masih dalam proses pencairan, sementara tombol “Browse” dipakai untuk menampilkan SPP yang sudah diproses pencairannya. Untuk memulai proses pencairan, silahkan lakukan pengisian data yang diperlukan dengan menekan tombol 2x terhadap SPP yang telah dilakukan pencairan, tampak berikut:

No_Cek	Tgl_Cek	Keterangan	Netto
0001/CASH/01.2001/2019	30/04/2019	Panjar Kegiatan Operasional Pemerintahan	3.210.000,00

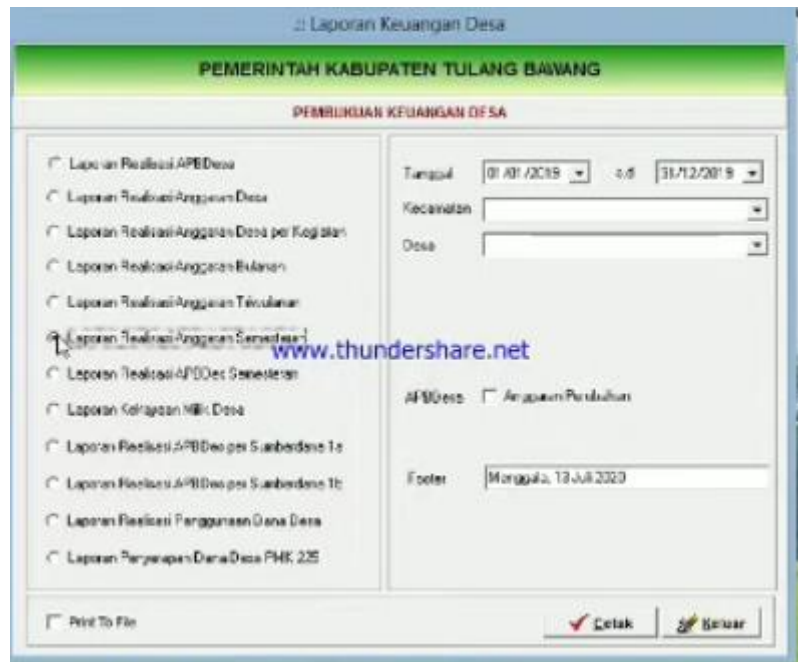
No Bukti: 0001/CASH/01.2001/2019  
Tgl Bayar: 30/04/2019  
Uraian: Panjar Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa  
Pembayaran:  Tunai  Bank  
Nama Bank:   
Jumlah: 3.210.000,00  
Potongan: 0,00  
Dibayarkan: 3.210.000,00

**Gambar 12. SPP dicairkan**

- 1) Silahkan tekan tombol 'tambah' untuk memulai proses
- 2) Silahkan mengisi nomor bukti pencairan sesuai dengan format yang telah ditetapkan, yakni 0001/CASH/01.2001/2019 (sebagai contoh). Format ini wajib digunakan untuk setiap pencairan dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran.
- 3) Pilih tanggal pencairan yang sesuai.
- 4) Isi uraian pembayaran untuk SPP.
- 5) Pilih jenis pembayaran (bank atau tunai).
- 6) Simpan data.
- 7) setelahnya cetak bukti pencairan sebagai tanda terima dari bendahara sebagai ketua pelaksana.
- 8) Telah usai

### C. laporan keuangan

dalam penyusunan laporan keuangan maka dilakukan dengan Kembali ke tampilan antar muka aplikasi dan klik laporan – pembukuan.



Gambar 13. Pembukuan Keuangan Desa

Dan jika ingin melihat semua laporan klik yang ada pada menu kiri – isi tanggal, kecamatan, desa – cetak.

No.	Kode	Nama Paket Kegiatan	Cara Pengadaan	Ukuran Output	Realisasi Output	%	Saldo Anggaran	Realisasi Tahap 1	Realisasi 1-3 Tahap 2	Realisasi 1-3 Tahap 3
1	1.04.00 HMBK	HONOR OPERATOR DESA	Sewa	12.00 Paket	P1: 12.00 P2: 12.00 P3: 12.00	100 100 100	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
2	2.00.00 20000	HONOR SURVEILLANS	Sewa	2.00 Paket	P1: 2.00 P2: 2.00 P3: 2.00	100 100 100	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	2.00.00 20000	RENTAN SURVEILLANS	Sewa	3.00 Paket	P1: 3.00 P2: 3.00 P3: 3.00	100 100 100	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
4	2.00.00 20000	RENTAN SURVEILLANS	Sewa	3.00 Paket	P1: 3.00 P2: 3.00 P3: 3.00	100 100 100	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5	2.00.04 20000	HONOR PETUGAS	Sewa	3.00 Lks	P1: 3.00 P2: 3.00 P3: 3.00	100 100 100	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6	2.00.00 20000	REACTORISAL DESA	Sewa	3.00 Lks	P1: 3.00 P2: 3.00 P3: 3.00	100 100 100	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
7	2.00.04 20000	HONOR PETUGAS DAN JANGKUTAN (TANPA)	Sewa	3.00 Lks	P1: 3.00 P2: 3.00 P3: 3.00	100 100 100	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00

Gambar 14. realisasi anggaran desa

KODE DESA	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MELAKSI		
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	20.772.714,00	4.772.714,00	
4.2	Pendapatan Hibah	7.729.809.016,00	2.018.802.014,00	(5.711.007.002,00)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>25.729.809.016,00</b>	<b>22.791.516.728,00</b>	<b>(2.938.292.288,00)</b>	
5	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	428.752.213,00	401.005.240,00	(27.746.973,00)	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	314.894.303,00	827.837.889,00	512.943.586,00	
5.3	Belanja Modal	106.152.300,00	579.134.889,00	472.982.589,00	
5.4	Belanja Tidak Terutang	690.270.850,00	922.811.100,00	232.540.250,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.539.869.666,00</b>	<b>1.931.679.118,00</b>	<b>(388.190.548,00)</b>	
	<b>SELISIR (SISKEUD)</b>	<b>0,00</b>	<b>(192.871.118,00)</b>	<b>(192.871.118,00)</b>	
6	PERUBAHAN				
6.1	Peningkatan Pembiayaan	0,00	134.889.836,00	134.889.836,00	
6.1.1	SLTA Tahun Sabukmas	0,00	134.889.836,00	134.889.836,00	
	<b>PERUBAHAN NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.889.836,00</b>	<b>134.889.836,00</b>	

Gambar 15. Perubahan Anggaran Desa

## Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan Desa

Kendala dalam pengimplementasian sistem keuangan desa sering terjadinya kendala yaitu keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa dalam aplikasi Siskeundes dan kurangnya pemahaman mengenai struktur dan komponen laporan keuangan sesuai PP No. 71 Thn 2010.

## KESIMPULAN

### kesimpulan

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapang (KKL) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen yang digunakan ketika penyusunan laporan keuangan desa di Desa Pondokkaso Landeuh adalah: BKU serta rekening koran.
2. Implementasi Siskeundes di penyusunan rekap keuangan Desa, diawali dengan pengisian informasi SPP definitif dan pencairan SPP. SPP Definitif diterapkan untuk meminta pembayaran atas pekerjaan/barang/jasa yang telah diselesaikan. Permohonan Pencairan dana dilakukan berdasarkan SPP yang sudah disetujui kepala desa dan proses lebih lanjut maka kaur keuanganlah yang bertanggung

jawab. Setelah data yang tersusun maka pembukuan sudah selesai dan bisa dilihat dalam pembukuan laporan keuangan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam implemtasi Sistem Keuangan Desa (Siskeundes) dalam penyusunan laporan keuangan adalah keterlambatan dalam pelaporan keuangan di aplikasi Siskeundes dan kurangnya pemahaman mengenai struktur laporan keuangan yang disusun dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil KKL tersebut, maka timbul saran sebagai evaluasi untuk memperaiki permasalahan, Adapun saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Desa Pondokkaso Landeuh dapat meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti komputer dan jaringan internet untuk memastikan akses yang stabil dan tidak terhambat ke Siskeundes.
2. Pemerintah Desa Pondokkaso Landeuh dapat berfokus untuk meningkatkan keahlian SDM, seperti melakukan pelatihan kembali dalam penggunaan Siskeundes.
3. Selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Siskeundes agar dapat menghindari terjadinya kesalahan.

### **REFERENSI**

- Alawiyah, S., Setiawan, A. B., & Hambani, S. (2023). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Siklus Penerimaan Kas Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Cabang Cicurung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10234–10249.
- Asih K.G, Adiputra I.M.P. 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol. 13(01): 12-23.

Bambi J.L., Rismawati, KUSDARIANTO. 2022. Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bua.1-15.

Faizah A. 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol. 5 No 1: 763-776.